

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas (Boned-Gómez, 2023).

Menurut Creswell (2015), pendekatan kualitatif memiliki beberapa bentuk desain penelitian, kelima pendekatan itu adalah pendekatan naratif, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus. Untuk memperoleh gambaran hasil penelitian yang tepat, maka diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan tujuan. Berdasarkan tujuan penelitian, desain penelitian yang paling cocok adalah desain studi kasus.

Studi kasus adalah salah satu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengkaji suatu "kasus" tertentu dalam konteks atau *setting* kehidupan nyata yang kontemporer. Peneliti studi kasus dapat menentukan tipe penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, seperti studi kasus instrumental tunggal (berfokus pada satu isu atau masalah tertentu), studi kasus kolektif (menggunakan berbagai kasus untuk menggambarkan satu masalah penting dari berbagai sudut pandang), dan studi kasus intrinsik (berfokus pada kasus itu sendiri karena dianggap unik atau tidak biasa). Prosedur utama dalam studi kasus melibatkan *purposeful sampling*, yaitu pemilihan kasus yang dianggap relevan atau penting, yang kemudian diikuti oleh analisis holistik terhadap kasus tersebut melalui deskripsi rinci mengenai pola-pola, konteks, dan setting di mana kasus tersebut berlangsung (Creswell, 2015).

Studi kasus bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena tertentu dalam konteks spesifik. Dalam hal ini, kualifikasi instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di beberapa provinsi adalah fokus utama. Studi

kasus memungkinkan eksplorasi menyeluruh tentang bagaimana instruktur memenuhi standar kualifikasi dan mengatasi kendala yang mereka hadapi, sesuai dengan konteks spesifik BLK.

3.2 Partisipan

Penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan tata boga di Balai Latihan Kerja (BLK). Partisipan yang diwawancarai dalam penelitian ini mencakup Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Kepala BLK yang dipilih sebagai partisipan. Sementara itu, peserta FGD terdiri dari instruktur pelatihan pembuatan roti dan kue.

Penelitian dilakukan di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Bali. Pemilihan provinsi ini didasarkan pada keterwakilan wilayah dari berbagai pulau besar di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan pelatihan tata boga di BLK. Daftar BLK yang memiliki program keahlian pembuatan roti dan kue di lima provinsi disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Program Keahlian Pembuatan Roti dan Kue di Lima Provinsi di Indonesia

Provinsi	Kabupaten/Kota
Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor
Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan
Aceh	Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Bener Meriah, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen
Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut
Bali	Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan

Tabel di atas menunjukkan jumlah BLK yang memiliki program keahlian pembuatan roti dan kue di setiap provinsi. Namun, penelitian ini tidak mengambil seluruh BLK dalam daftar tersebut, melainkan hanya BLK yang

memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, teknik *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan partisipan.

Teknik *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Imansari dan Kholifah (2023), *purposive sampling* digunakan untuk memilih subjek yang memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian, bukan secara acak, berstrata, atau berdasarkan wilayah. Teknik ini diterapkan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, sehingga tidak memungkinkan pengambilan sampel dalam jumlah besar. Selain itu, teknik ini memastikan bahwa sampel yang dipilih dapat mewakili populasi secara relevan.

Purposive sampling diterapkan dalam pemilihan instruktur pelatihan pembuatan roti dan kue serta Kepala BLK. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja di Disnakertrans dari masing-masing provinsi guna memperoleh informasi mengenai kebijakan dan pengelolaan program pelatihan di BLK. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki program pelatihan keahlian pembuatan roti dan kue
2. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan secara *online* melalui Google, situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), serta media sosial Instagram.

Daftar Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja yang menjadi partisipan penelitian ini disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Daftar Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)

No	Inisial	Jabatan	Institusi
1.	J.I.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
2.	T.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
3.	G.H.	Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

No	Inisial	Jabatan	Institusi
4.	S.G.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali
5.	I.F.	Bidang Pembinaan Pelatihan, Produktivitas, dan Penampilan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan

Daftar Kepala Balai Latihan Kerja yang menjadi partisipan penelitian ini disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Daftar Kepala Balai Latihan Kerja

No	Inisial	Institusi	Provinsi
1.	R.F.	UPTK BLK Kabupaten Sumedang	Jawa Barat
2.	N.S.	UPTD BLK Kota Padangsidempuan	Sumatera Utara
3.	E.M.	UPTD BLK Redelong Kabupaten Bener Meriah	Aceh
4.	A.N.	BLK Pelaihari	Kalimantan Selatan
5.	N.K.B.	UPTD BLK Kabupaten Buleleng	Bali

Daftar instruktur tata boga pada program keahlian pembuatan roti dan kue yang menjadi partisipan penelitian ini disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Daftar Partisipan Instruktur Tata Boga pada Program Keahlian Pembuatan Roti dan Kue

No	Provinsi	Jumlah BLK	Partisipan (Orang)
1.	Jawa Barat	12	6
2.	Sumatera Utara	4	2
3.	Aceh	8	4
4.	Kalimantan Selatan	8	4
5.	Bali	6	3
Jumlah			19

Berdasarkan kriteria kesediaan berpartisipasi, diperoleh 19 orang instruktur tata boga yang mengikuti FGD. Berikut adalah demografi partisipan yang telah dikumpulkan.

Tabel 3.5 Demografi Partisipan *Focus Group Discussion* (FGD)

No	Provinsi	Nama BLK	Inisial Instruktur	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Sertifikat Instruktur	Sertifikat Keahlian	Pengalaman Kerja (Tahun)
1.	Jawa Barat	UPTD BLK Sumedang	D.N	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	Level 4	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	3
2.		UPT BLK Kabupaten Kabupaten Garut	S.S.	S1	Pendidikan Tata Boga	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	2
3.		UPTD BLK Kabupaten Kuningan	L.	S1	Pendidikan Ekonomi	Level 4	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	4
4.		UPTD BLK Kabupaten Bekasi	C.P.S.	S1	Pendidikan Tata Boga	Level 4	Sertifikat Keahlian Commis Pastry, Commis Bakery, Penyiapan Layanan Produk Makanan dan Minuman	14
5.		UPTD BLK Kabupaten Indramayu	N.A.	S1	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	4
6.		UPTD BLK Kabupaten Bandung Barat	K.B.P.	S1	Pendidikan Tata Boga	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	6
7.	Sumatera Utara	UPTD BLK Kabupaten Deli Serdang	N.E.P.	S1	Pendidikan Tata Boga	Level 3	Sertifikat BNSP KKNI Level II Pastry Cook	8
8.		UPTD BLK Kota Padangsidimpuan	A.E.	SMA	Tidak	Level 4	Sertifikat Pengolahan Bogasari	16
9.	Aceh	UPTD BLK Takengon	R.D.	S1	Ekonomi Manajemen	Tidak Mempunyai	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	4
10.		UPTD BLK Redelong	W.	S1	Administrasi Negara	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	3

No	Provinsi	Nama BLK	Inisial Instruktur	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Sertifikat Instruktur	Sertifikat Keahlian	Pengalaman Kerja (Tahun)
		Kabupaten Bener Meriah						
11.		BLK Aceh Selatan	N.U.	S1	Tata Boga	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	3
12.		UPTD BLK Meulaboh	H.	SMK	Tidak	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	2
13.		BLK Pelaihari	B.S.	S1	Agronomi	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	12
14.		UPTD BLK Tanjung	M.	S1	Ilmu Pendidikan	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	2
15.	Kalimantan Selatan	UPTD BLK Barito Kuala	Z.C.	DII	F&B Pastry	Tidak Mempunyai	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	1
16.		UPTD BLK Kotabaru	H.A.R.	DIII	Teknologi Industri Pertanian	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	5
17.		UPTD BLK Bangli	L.K.A.	S1	Pariwisata	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	12
18.	Bali	UPTD BLK Agrobisnis Industri Kab.Gianyar	N.L.D.	S1	Perhotelan	Level 3	Sertifikat BNSP Pembuatan Roti dan Kue	4
19.		UPTD BLK Kabupaten Buleleng	M.S.K.	S1	Pendidikan Tata Boga	Level 2	Assesor Tata Boga, Sertifikat Ujikom, Buncher, dan Demi Chef	8

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan penting dalam penelitian, untuk mempermudah proses ini, diperlukan teknik dan metode yang sesuai (Raharjo, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai teknik pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi satu arah di mana peneliti menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat pada susunan pertanyaan yang kaku, untuk memperoleh data yang diinginkan (Taylor & Bogdan, 1984). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan instrumen pedoman wawancara tertulis berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pada wawancara terstruktur, urutan dan perumusan pertanyaan sudah ditetapkan secara baku dan tidak boleh diubah (Gunawan, 2022).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada 20 Januari hingga 3 Februari 2025 dengan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans, Kepala BLK, serta instruktur program keahlian pembuatan roti dan kue. Wawancara dengan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans serta Kepala BLK dilakukan satu kali dengan tiga topik pertanyaan, sedangkan wawancara dengan instruktur program keahlian pembuatan roti dan kue dilakukan satu kali dengan empat pertanyaan. Seluruh wawancara dilakukan secara daring melalui sambungan telepon, dan direkam secara langsung menggunakan fitur perekam pada telepon seluler selama wawancara berlangsung.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans serta Kepala BLK bertujuan menggali informasi mengenai regulasi kualifikasi instruktur, harapan dalam memastikan kualifikasi instruktur, serta kendala yang dihadapi instruktur dalam memenuhi standar

kualifikasi. Sementara itu, wawancara dengan instruktur program keahlian pembuatan roti dan kue difokuskan untuk mengetahui kualifikasi yang dimiliki instruktur.

2. *Focus grup discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan perluasan metode wawancara, yaitu wawancara kelompok mendalam yang terstruktur dan terorganisir dengan bantuan fasilitator atau moderator untuk mengeksplorasi topik yang telah dipilih (Gundumogula, 2020). Tujuan utama FGD adalah mengumpulkan data melalui interaksi antarpartisipan guna menggali informasi lebih mendalam dan mengungkap berbagai aspek suatu fenomena sehingga dapat didefinisikan serta dijelaskan dengan lebih baik. Interaksi dalam diskusi kelompok ini memungkinkan pengungkapan kesamaan maupun perbedaan pengalaman serta memberikan perspektif yang kaya dan terfokus (Scheelbeek et al., 2020).

Kelompok FGD terdiri dari 6 hingga 12 peserta yang diundang untuk mendiskusikan topik tertentu dengan dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator (peneliti). Para peserta memiliki kesamaan dalam aspek tertentu dan berbagi pendapat, pengalaman, atau ide dalam percakapan yang dinamis. Hasil diskusi kemudian direkam dalam bentuk audio atau video serta ditranskripsi untuk analisis lebih lanjut oleh peneliti (Deborah, 2019).

FGD dalam penelitian ini dilaksanakan pada Selasa, 11 Februari 2025, pukul 19.00 WIB hingga selesai secara daring melalui *Zoom Meeting*, dengan partisipan yang terdiri dari 19 instruktur program keahlian pembuatan roti dan kue. Selama FGD berlangsung, seluruh proses direkam secara langsung menggunakan fitur perekam pada *Zoom Meeting* dalam bentuk video dan rekaman suara. Pemilihan partisipan mempertimbangkan keberagaman perspektif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi serta tantangan dalam memenuhi standar kualifikasi instruktur di berbagai wilayah Indonesia.

Diskusi dalam FGD terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) Regulasi kualifikasi instruktur, (2) Kendala dalam memenuhi standar kualifikasi, dan (3) Harapan dalam memenuhi standar kualifikasi. Hasil dari FGD ini akan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan, peningkatan kompetensi instruktur, serta perbaikan standar rekrutmen dan sertifikasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelatihan di BLK dalam bidang keterampilan tata boga, khususnya pada program keahlian pembuatan roti dan kue. Selain itu, FGD digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait standar sertifikasi keahlian instruktur di bidang tata boga, mengungkap kendala dalam pemenuhan standar kualifikasi, serta menganalisis kualifikasi instruktur di BLK pada program keahlian tersebut.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pedoman wawancara dan FGD untuk mengumpulkan data secara sistematis. Pedoman wawancara disusun untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dengan tujuan penelitian, mencakup kualifikasi yang dimiliki oleh instruktur pembuatan roti dan kue, serta regulasi terkait kualifikasi instruktur, kendala yang dihadapi, dan harapan terhadap pemenuhan standar kualifikasi menurut Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Disnakertrans, serta Kepala BLK. Sementara itu, pedoman FGD dirancang untuk menggali lebih dalam mengenai regulasi kualifikasi instruktur, kendala yang dihadapi, serta harapan dan rekomendasi bagi pengembangan kualifikasi instruktur. Pedoman wawancara dan FGD yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat secara rinci pada lampiran (lihat Lampiran 2, 3, dan 4, halaman 116, 117, dan 119).

3.5 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencerminkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian. Menurut Zulfadrial (2012), konsep ini sepadan dengan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, namun disesuaikan dengan paradigma kualitatif. Lincoln dan Guba (1985) dalam Wijaya (2018) menyatakan bahwa realitas dalam penelitian kualitatif bersifat

majemuk dan dinamis, sehingga tidak sepenuhnya konsisten atau berulang. Keabsahan data dapat dicapai melalui teknik triangulasi, yaitu pengumpulan dan pengecekan data dari berbagai sumber. Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari wawancara untuk memastikan kredibilitas temuan. Berikut tahapan triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini (Mekarisce, 2020):

1. Pengumpulan Data dari Berbagai Sumber

Peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan lima Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans serta lima Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) dari Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Bali.

2. Perbandingan dan Verifikasi Data

Data dari berbagai informan dibandingkan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta inkonsistensi dalam informasi yang diperoleh. Tahap ini bertujuan memastikan validitas data dan memahami berbagai perspektif dari tiap sumber.

3. Analisis Data dan Pengodean

Data yang telah diverifikasi dianalisis secara mendalam melalui proses pengodean untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar informasi. Pengodean membantu mengorganisir data agar lebih sistematis dan mudah diinterpretasikan. Selanjutnya, peneliti mengkaji makna temuan dalam konteks penelitian serta memvalidasi hasil interpretasi dengan berbagai sumber guna meningkatkan kredibilitas temuan.

4. Penyimpulan Hasil Triangulasi

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi, peneliti merumuskan kesimpulan yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap temuan penelitian. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang dikaji.

3.6 Analisis Data

1. Analisis Data menurut Miles and Huberman

Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang saling berhubungan, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penjelasan dari ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans, Kepala BLK, serta *Focus Group Discussion* (FGD) dengan instruktur program keahlian pembuatan roti dan kue. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditranskrip dalam bentuk tulisan (*script*) sesuai format yang telah ditentukan.

b. Penyajian Data

Data hasil wawancara dan FGD disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipahami. Selain itu, data mengenai kualifikasi instruktur bidang keterampilan tata boga pada program keahlian pembuatan roti dan kue, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan, juga disajikan dalam bentuk chart guna memperjelas hasil analisis.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

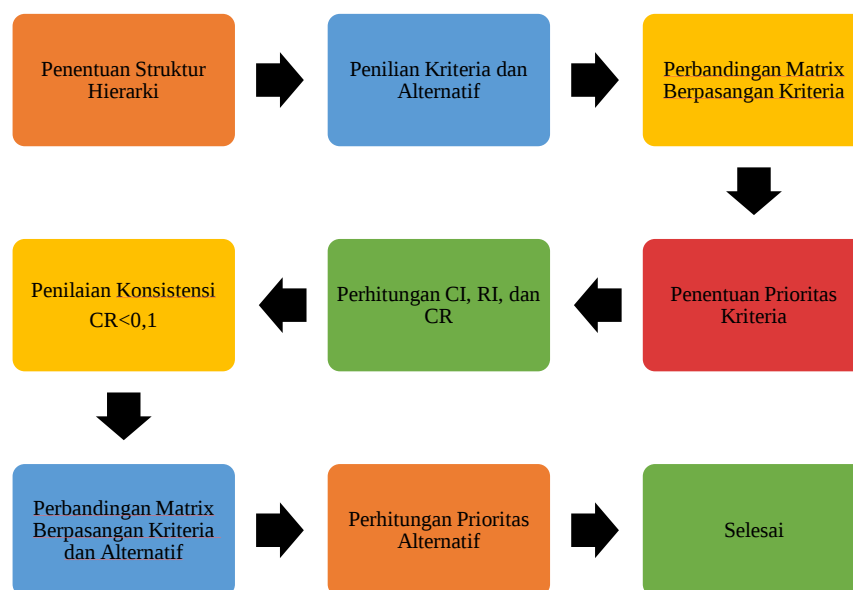
Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian, dengan tujuan merangkum temuan serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang dikaji. Verifikasi dilakukan untuk memastikan konsistensi dan validitas hasil penelitian sebelum ditarik kesimpulan akhir.

2. Analisis Data *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Dalam penelitian ini, AHP diterapkan untuk pengambilan keputusan untuk menentukan kualifikasi instruktur di BLK bidang tata boga pada program keahlian pembuatan roti dan kue. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Disnakertrans dan Kepala BLK, serta melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para instruktur program keahlian pembuatan roti dan kue. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan *Microsoft Excel* untuk menyusun matriks perbandingan berpasangan, menentukan bobot prioritas, dan menguji konsistensi keputusan dalam pemilihan instruktur terbaik.

Langkah-langkah dalam metode AHP dapat tersaji dari gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 3.1 Langkah-langkah analisis data AHP (Kurniawan, 2014)

1. Penentuan Struktur Hierarki

Dalam bagian ini diperkenalkan suatu pendekatan konseptual untuk penilaian kualifikasi instruktur dengan menggunakan model AHP. Dalam model yang diusulkan dalam penelitian ini, setidaknya terdapat 3 level hirarki sebagai berikut (Miftahun, 2014):

- a. Level I: Sasaran atau tujuan dari keputusan yang akan diambil ditempatkan pada puncak hirarki. Dalam hal ini sasaran yang dimaksud adalah “Menentukan Kualifikasi Instruktur di BLK Bidang Tata Boga, Pembuatan Roti dan Kue
- b. Level II: Pada tingkatan kedua, ditetapkan kriteria penilaian yang menentukan kualitas atau kelayakan instruktur berdasarkan faktor-

faktor yang relevan. Kriteria tersebut meliputi regulasi pemerintah, sertifikasi kompetensi, kualifikasi pendidikan, kesesuaian latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar.

- c. Level III: Pada tingkatan ketiga, diusulkan alternatif. Alternatif yang diusulkan adalah jenis instruktur yang dibandingkan, yaitu instruktur yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan instruktur yang berstatus honorer atau kontrak (Non ASN).

2. Penilaian Kriteria dan Alternatif

Dalam proses AHP digunakan skala kepentingan relatif dari Saaty (Saaty,1990), yang memiliki rentang nilai dari 1 hingga 9. Penjelasan tentang skala ini dapat diamati pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Skala Fundamental yang Digunakan Dalam AHP (Saaty, 1977).

Intensitas Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Sama pentingnya	Dua kriteria memiliki pengaruh yang sama dalam pengambilan keputusan. Tidak ada yang lebih dominan satu sama lain.
3	Kepentingan sedang antara satu dengan lain	Satu kriteria lebih penting dibandingkan yang lain
5	Penting atau sangat penting	Salah satu kriteria jauh lebih penting
7	Kepentingan sangat kuat	Satu kriteria sangat dominan dibandingkan lainnya.
9	Sangat penting	Satu kriteria memiliki kepentingan mutlak dan harus menjadi prioritas utama dibandingkan aspek lainnya.
2, 4, 6, 8	Nilai menengah antara dua penilaian yang berdekatan	Digunakan ketika terdapat perbedaan kecil dalam kepentingan dua kriteria sehingga perlu ada kompromi.
Timbal Balik	Nilai timbal balik untuk perbandingan terbalik	Jika kriteria A dibandingkan dengan B memiliki nilai x , maka B dibandingkan A memiliki nilai $1/x$.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.6, skala perbandingan dalam metode AHP mengikuti prinsip berikut: nilai 1 diberikan jika dua kriteria memiliki kepentingan yang sama, nilai 3 jika satu kriteria sedikit lebih penting dibandingkan yang lain, nilai 5 jika satu kriteria jauh lebih penting, nilai 7 jika satu kriteria sangat dominan, dan nilai 9 jika satu kriteria memiliki kepentingan mutlak di atas yang lain. Nilai menengah (2, 4, 6, 8)

dapat digunakan jika pembuat keputusan merasa ragu-ragu antara dua tingkat kepentingan yang berdekatan. Dengan menggunakan skala ini, matriks perbandingan berpasangan dapat dibangun, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan bobot relatif setiap kriteria dalam proses AHP.

3. Perbandingan Matrix Berpasangan Kriteria

Setelah menentukan kriteria yang digunakan dalam analisis, langkah selanjutnya adalah menyusun matriks perbandingan berpasangan. Dalam matriks ini, setiap kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya berdasarkan skala kepentingan AHP. Perbandingan ini dilakukan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif masing-masing kriteria dalam proses penilaian kualifikasi instruktur.

4. Penentuan Prioritas Kriteria

Dari matriks perbandingan berpasangan, dilakukan normalisasi nilai untuk mendapatkan bobot prioritas masing-masing kriteria. Nilai prioritas ini diperoleh dengan membagi setiap elemen matriks dengan total kolomnya, kemudian menjumlahkan hasil perhitungan per baris dan membaginya dengan jumlah kriteria. Bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing kriteria dalam penentuan kualifikasi instruktur.

5. Perhitungan CI, RI, dan CR

Untuk memastikan konsistensi dalam perhitungan, dilakukan perhitungan *Consistency Index* (CI), *Random Index* (RI), dan *Consistency Ratio* (CR). Perhitungan ini bertujuan untuk menilai apakah perbandingan yang telah dibuat cukup konsisten atau perlu dilakukan revisi. Konsistensi dalam AHP sangat penting agar bobot yang diperoleh benar-benar mencerminkan prioritas yang logis dan dapat diandalkan.

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

keterangan:

CI = Indeks konsistensi

λ_{maks} = Maximum eigenvalue (jumlah penilaian seluruhnya)

n = Orde matriks

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Dimana nilai RI (*Random Index*) bergantung pada jumlah kriteria seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Nilai RI (*Random Index*)

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Sumber: Saaty & Vargas, 2012

6. Penilaian Konsistensi $CR < 0,1$

Dalam metode AHP, suatu perhitungan dianggap konsisten jika nilai CR kurang dari 0,1. Jika nilai CR lebih besar dari 0,1, maka perbandingan dalam matriks harus diperbaiki dengan meninjau kembali nilai-nilai perbandingan yang diberikan sebelumnya. Konsistensi ini memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tidak bersifat subjektif berlebihan.

7. Perbandingan Matriks Berpasangan Kriteria dan Alternatif

Setelah menentukan bobot prioritas dari masing-masing kriteria, langkah berikutnya adalah membuat matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif berdasarkan setiap kriteria. Alternatif dalam penelitian ini adalah instruktur ASN dan Non ASN, yang akan dibandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkat kepentingan relatif pada setiap kriteria yang telah ditetapkan.

8. Penentuan Prioritas Alternatif

Dari matriks perbandingan alternatif, dilakukan normalisasi dan perhitungan bobot prioritas untuk menentukan instruktur dengan kualifikasi terbaik. Setiap alternatif dikalikan dengan bobot kriteria masing-masing, lalu dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir. Alternatif dengan bobot

tertinggi merupakan pilihan terbaik dalam menentukan kualifikasi instruktur BLK bidang tata boga, pembuatan roti, dan kue.